

BAB II

MASALAH PEREMPUAN SERTA AKSES PENDIDIKAN

PEREMPUAN DI AFGHANISTAN DAN EKSISTENSI SAKENA FUND

Afghanistan secara historis telah mengalami gejolak politik yang rumit, berbagai ambisi berasal dari banyak kelompok yang mencoba untuk menguasai negara tersebut. Hal tersebut, mengakibatkan adanya perubahan rezim terjadi yang mempengaruhi masyarakat setempat tak terkecuali bagi perempuan serta anak perempuan sebagai pihak yang dianggap “lemah” sehingga adanya superioritas antar satu pihak yang merasa lebih unggul. Berbagai masalah dan tantangan kemudian muncul menjadi kendala yang dihadapi oleh perempuan pada berbagai aspek tak terkecuali pendidikan. Oleh karena itu, pada bab ini menggambarkan perempuan di Afghanistan.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Perempuan di Afghanistan

2.1.1. Sejarah Peran Perempuan di Afghanistan

Berdasarkan sejarahnya, Afghanistan juga teridentifikasi menjadi negara yang menghargai serta menghormati perempuan. Ditandai dengan pemerintahan Ratu Gawhar Shad tahun 1447 di Herat yang menggantikan suaminya Shah Rukh, sebagai bukti yang menunjukkan bahwa posisi perempuan dalam pengambilan kebijakan dapat terjadi. Namun, Reformasi awal kemudian terjadi sejak pemerintahan Abdur Rahman Khan pada tahun 1880, yang mempengaruhi kedudukan serta pandangan pada perempuan Afghanistan. Berbagai peraturan yang dikonstruksi mulai terjadi pada perempuan, hingga perubahan ke arah

modernisasi akhirnya terbentuk pada tahun 1919, dimana Raja Amanullah serta Ratu Soraya memberi perhatian atas posisi perempuan yang termarginalkan. Tahun 1920 Raja menumpas perbudakan, membebaskan perempuan dari gundik, dan pembentukan asosiasi perlindungan perempuan. Beriringan dengan itu, Ratu Soraya juga bergerak membuat sebuah majalah pertama berjudul *Irshadi Niswan (The Guide for Women)* sebagai promosi emansipasi perempuan.⁵⁵

Pada tahun 1928, pemimpin daerah pedesaan memberi perhatian dengan membuat sebuah koalisi atas kebebasan bagi perempuan di Kabul, Afghanistan. Hal tersebut dikarenakan pihak oposisi suku konservatif yang secara efektif menghalangi akses pendidikan anak perempuan serta menentang bentuk modernisasi dan menekan Raja Amanullah untuk menerapkan kebijakan yang lebih tradisional. Di tengah berbagai tekanan yang didapat tahun 1929, Amanullah lepas dari jabatannya kemudian meninggalkan negara tersebut. Sampai pada dua puluh dekade mendatang, Afghanistan mengalami masa-masa sulit dengan berbagai konflik persaingan meraih kekuasaan politik.⁵⁶

Selanjutnya, Nadir Shah yang juga merupakan sepupu Amanullah menduduki kekuasaan di negara Afghanistan dengan jaminan atas peraturan berbasis syariah serta menghapus kata “Perempuan” pada hak-hak yang mereka miliki dari peraturan konstitusi tahun 1931-1964 agar meredakan pergolakan oleh kelompok hierarki agama konservatif yang terjadi. Selanjutnya Raja Zahir Shah (Anak Nadir Shah) memegang kekuasaan dengan salah satu orientasi pada

⁵⁵ Rosemarie Skaine, 2002, *The Women of Afghanistan Under the Taliban*, Karolina Utara: McFarland.

⁵⁶ Sureyya Yigit, *The Women of Afghanistan: Past and Present Challenges*, Journal of Social Science Studies, Vol 4, No, 2 (2017), Turkey: Macrothink Institute, hal. 209-210.

terciptanya hak-hak perempuan dengan bertahap, sebab belajar dari pemerintahan sebelumnya atas bahaya melakukan perubahan besar dalam kurun waktu singkat, sekitar 40 tahun menjabat, hak perempuan cukup terpenuhi diantaranya pada aspek hak memilih, bekerja, meraih pendidikan, serta kebebasan mengambil keputusan hidup baik itu menikah, berpakaian, maupun mengejar gelar pendidikan tinggi. Pada masa tersebut dapat dikatakan sebagai era keemasan Afghanistan dimana keterlibatan perempuan berpengaruh atas pembangunan negara.⁵⁷

Di bawah Pemerintahan Zahir Shah, Perdana Menteri saat itu juga dikenal dengan Muhammad Daoud Khan menyusun sebuah kabinet. Kepercayaan yang diberikan Raja Zahir Shah dalam rangka membuat negara menjadi lebih modern juga diupayakan untuk mendapat perhatian Soviet serta Amerika sebagai negara adidaya yang berpeluang meningkatkan ekonomi negara. Hasil dari pembuatan kebijakan Daoud Khan pada lima tahun pertama menghasilkan perkembangan sosial di banyak bidang seperti tingkat pendidikan serta jaminan kesehatan.

Namun, saat Pakistan menutup batasan, Afghanistan bergantung pada soviet yang dengan kata lain protektorat politik dan ekonomi mengandalkan Soviet, padahal sebenarnya hal tersebut dimanfaatkan juga soviet pada kepentingannya sendiri. Perbedaan pandangan juga muncul yang melahirkan dua kubu yakni golongan pro-soviet serta anti-soviet, tahun 1963 juga menjadi

⁵⁷ Adenrele Awotona, 2019, *Rebuilding Afghanistan In Times of Crisis- A Global Response*, New York: Routledge, Hal. 123.

tantangan sendiri bagi Zahir Shah dalam mengambil keputusan yakni dengan peralihan bentuk parlemen menjadi monarki konstitusional di tahun berikutnya.⁵⁸

Pada masa tahun 1964 dalam pemilihan umum, perempuan juga dapat terlibat aktif baik memilih kandidat maupun turun langsung mencalonkan diri pada pelaksanaan pemilihan umum, namun pada realita yang terjadi politik Afghanistan tidak mengalami perubahan skala besar. Tetap mengacu pada konstitusi pasal 15 dimana raja masih memiliki hak memilih Perdana Menteri. Sampai pada demokrasi 1965 dan 1966 kebebasan yang didengungkan tidak lagi berlaku.⁵⁹ Era 1978 dan 1979, terjadi pemberontakan cukup parah dengan menargetkan perempuan perihal cara berpakaian, mobilitas, serta eksistensi mereka di ruang publik. Perjalanan histori atas *women's right* atau hak perempuan negara Afghanistan tak jarang menjadi hal yang selalu dibawa.

Di bawah *People's Democratic Party of Afghanistan* (PDPA) mengambil alih kekuasaan dengan cara Revolusi Saur atau *The Saur Revolution* dan mendukung penghapusan angka buta huruf perempuan serta mendorong partisipasi keterlibatan perempuan bidang politik maupun ekonomi, akan tetapi invasi soviet pada 1979 mengakibatkan medan perang saudara berlangsung antara pemangku kebijakan negara dan kaum mujahidin (pejuang) yang juga disokong oleh Amerika Serikat serta para sekutunya, dan terjadi pelanggaran atas HAM serta perempuan yang menjadi korban tertindas.⁶⁰

⁵⁸ Iraj Bashiri, *Afghanistan: An Overview*, Angel Fire, diakses dalam <https://www.angelfire.com/rnb/bashiri/Afghanistan/AfghanOverview.html> (18/3/2024, 08:10 WIB)

⁵⁹ Fred Halliday, *Revolution in Afghanistan*, No,112 (1996), New Left Review.

⁶⁰ Deniz Kandiyoti, *Old Dilemmas or New Challenges? The Politics of Gender and Reconstruction in Afghanistan*, Development and Change, Vol, 38, Issue, 2 (2007), Wiley Online Library, hal.175.

Pada akhirnya tahun 1992, setelah pemerintahan yang didukung Soviet runtuh, berlangsung perseteruan antar faksi, dan membawa Afghanistan menghadapi masalah serius, adanya kekosongan pemangku politik negara, beberapa talib (kumpulan pelajar agama pada perlawanan militer) berkumpul menjadi kelompok Taliban. Kelompok tersebut acapkali menegaskan aturan cukup ketat yang menambah kompleksitas problematika negara, hingga saat berkuasa di Kabul pada 1996, dengan kedudukan tersebut Taliban memanfaatkan untuk mengkonstruksi status perempuan dalam masyarakat sosial utamanya di perkotaan dengan penutupan sekolah bagi perempuan serta penerapan syariah atau hukum adat *Pushtun*, kebebasan perempuan di dalam lingkup publik terbatas, begitu pula dengan kebebasan pakaian yang digunakan. Bagi pelanggar menerima konsekuensi berupa sanksi yang didapat.⁶¹

2.1.2. Kondisi Perempuan Afghanistan

Kejahatan yang dialami oleh perempuan telah dilanggengkan baik aktor negara maupun non-negara, posisi Afghanistan yang merupakan negara terburuk atas eksistensi perempuan menurut ahli Thomson Reuters Foundation menjadi kendala yang cukup sulit untuk diatasi mengingat hal tersebut sudah berlangsung sejak lama. Berbagai permasalahan tersebut meliputi KDRT, pelecehan seksual, pernikahan di bawah umur, merenggut nyawa dengan dalih menjaga kehormatan, serta besarnya angka kematian pada ibu, yang membentuk situasi perempuan menjadi buruk di negara tersebut. Diketahui berdasarkan survei

⁶¹ Seran De Leede, *Afghan Women and the Taliban: An Exploratory Assessment*, International Centre for Counter – Terrorism - The Hague, Working Paper, April 2014, Leiden University, hal.4.

Promundo yang merupakan NGO di Amerika Serikat dan UN Women, pihak laki-laki Afganistan pro terhadap ketimpangan kebebasan yang dihadapi perempuan agar tidak mengancam serta merugikan posisi laki-laki.⁶²

Perempuan maupun anak perempuan di Afghanistan berada pada fase yang cukup genting, meskipun beragam upaya dilakukan dalam mendukung kebebasan mereka atas hak maupun meningkatkan kualitas diri, per tahun 2001 berdasarkan Survei Global, Afghanistan menempati urutan pertama atas eksistensi perempuan yang buruk. Setelah runtuhnya kekuasaan Taliban tahun 2001, perempuan memperoleh kemajuan secara krusial pada aspek politik, ekonomi, dan pendidikan pada beberapa daerah dan kota.⁶³ Ilustrasi perempuan Timur Tengah, yang pada konteks kali ini terhadap perempuan di negara Afghanistan seringkali tergambarkan sebagai pihak yang lemah, tertindas, dan tak berdaya. Namun, sebenarnya perempuan Afghanistan juga melakukan usaha dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan kebebasan dalam mengekspresikan diri. Kendali Taliban serta intervensi secara ekstrem pada berbagai aspek merupakan hal penting yang mengakibatkan kekacauan, konflik, serta perseteruan pendapat yang berbeda.⁶⁴

Pada dasarnya, Afghanistan memiliki masa-masa yang rumit kemudian diperparah dengan gejolak politik yang terjadi berulang kali, arus perubahan

⁶² Priyanka Singh, *Challenges Faced by Women Under the Taliban Regime in Afghanistan*, Journal of Polity & Society, Vol, 15, No, 1, (2023), DAV PG College, hal. 26.

⁶³ Mohd. Shahzad, *The State of Women in Afghanistan Since 2001*, International Journal of Humanities & Social Science Studies, Vol, II, Issue, II (2022), India: Research Gate, hal. 252.

⁶⁴ Muhammad Imran dan Sayed M. Ismail, *Khaled Hosseini's Women As Modern Archetypes: A Study of Obedient, Resistant and Empowered Afghan Women*, Sec. Gender, Sex and Sexualities, Vol, 7 (2022), Frontiers.

tersebut menambah kompleksitas masalah negara Afghanistan, Taliban sebagai kelompok yang didominasi kekuasaan laki-laki menghiraukan kepentingan perempuan sebab tidak merasakan secara langsung posisi tersebut. Kejahatan yang dilakukan laki-laki dalam lingkungan keluarga, mencederai, sampai menghilangkan nyawa anggota keluarga namun tetap terbebas dari jeratan hukuman. Sementara perempuan yang menjadi korban pelecehan, serta kekerasan lain dianggap sebagai bentuk ‘kejahatan moral’ atau dikatakan pezinah dilempar batu sampai tak bernyawa sebagai bentuk hukuman yang didapatkan.⁶⁵

Kedudukan kelompok Taliban di Afghanistan era 2.0 dimulai pada bulan September tahun 2021, penerapan pendidikan perempuan kembali menempati “prioritas rendah”, anak perempuan masih tidak dipersilakan pergi bersekolah pada tingkat sekolah menengah sampai muncul sebuah kebijakan baru yang disetujui, bahkan beberapa diantara siswi yang bersekolah mendapat ancaman dari kelompok militan atas kewajiban menutup rambut mereka yang menyebabkan adanya rasa cemas, ketakutan, dan tidak aman bagi para siswi untuk ikut pada proses kegiatan belajar di sekolah, dari kebijakan itu pula menambah kerentanan bagi perempuan maupun anak perempuan. Namun di sisi lain, Wakil Menteri Pendidikan memberi pernyataan bahwa anak laki-laki pada

⁶⁵ Amnesty International, *Women's Rights in Afghanistan*, Amnesty International UK, diakses dalam <https://www.amnesty.org.uk/womens-rights-afghanistan-history> (3/12/2023, 19: 34 WIB)

tingkat kelas tujuh sampai dua belas justru diberikan peluang mengikuti kelas, hal tersebut menunjukkan adanya ketimpangan yang terjadi.⁶⁶

Sejak Taliban mengambil alih rezim terhadap negara Afghanistan pada Agustus 2021, hak-hak perempuan menjadi lebih buruk, meskipun pemaparan mengenai pemenuhan hak-hak perempuan akan ditegakkan berlandaskan hukum Syariah, namun terhitung dari satu minggu pemerintahannya, kelompok tersebut mulai menumpas hak-hak masyarakat, terlebih lagi pada perempuan yang sejak dahulu sudah menjadi target yang menerima pembatasan berbagai peraturan, tidak hanya memberi larangan untuk berada di ruang publik kecuali didampingi kerabat laki-laki, Taliban kembali tidak memperbolehkan untuk mengakses pendidikan setelah sekolah dasar serta keterbatasan lain di tempat umum maupun layanan kesehatan dan pekerjaan.⁶⁷

Pembatasan yang dialami perempuan tentu memberikan dampak negatif dalam kehidupan mereka, hal tersebut didukung dengan laporan bahwa perempuan tidak terlihat, merasa terisolasi, dan tertekan layaknya hidup dalam bui. Kebutuhan dasar yang tak terpenuhi utamanya bagi perempuan yang mengalami kekerasan sulit mendapat dukungan secara psikologis. Keadaan itu kemudian menjadi urgen serta menjadi wujud pelanggaran bagaimana hak perempuan maupun anak perempuan direnggut.⁶⁸

⁶⁶ Gina Vale, dkk, *Repeating the Past or Following Precedent? Contextualising the Taliban 2.0's Governance of Women*, ICCT Research Paper, Januari 2023, International Centre for Counter-Terrorism.

⁶⁷ Leclerc Gabija dan Shreeves Rosamund, *Women's rights in Afghanistan an ongoing battle*, Report, April 2023, European Parliamentary Research Service. hal.7.

⁶⁸ *Afghanistan: UN experts say 20 years of progress for women and girls' rights erased since Taliban takeover*, United Nations Human Rights - office of the high commissioner, 08 Maret 2023, diakses dalam <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/03/afghanistan-un-experts-say-20-years-progress-women-and-girls-rights-erased>.

2.1.3. Kondisi Perempuan Afghanistan Terhadap Akses Pendidikan

Fenomena terkait akses pendidikan perempuan di Afghanistan menjadi masalah krusial yang berkepanjangan, larangan untuk mendapatkan edukasi bagi perempuan sangat dirasakan saat Taliban berkuasa tahun 1996 dengan secara penuh menutup akses yang memungkinkan perempuan mendapat pendidikan, sampai pada tumbangannya kekuasaan Taliban memberikan peluang besar bagi perempuan. Pada tahun 2004, terdapat konstitusi yang mengatur untuk jaminan hak pendidikan bagi semua kalangan masyarakat Afghanistan tak terkecuali bagi kaum perempuan, terdapat komitmen yang cukup kuat dicurahkan oleh pemerintah atas pemenuhan pendidikan.⁶⁹

Di Afghanistan dalam kurun lebih dari empat dekade, kesempatan perempuan meraih pendidikan terbatas. Keadaan tersebut juga diperparah dengan kondisi kemiskinan, perang, ketidakamanan wilayah, dan kultur serta norma konservatif, terlebih lagi terdapat berbagai regulasi Taliban sebagai kelompok berkuasa juga menjadi perih kompleks yang memberi dampak pada kebebasan perempuan dalam mengakses pendidikan.⁷⁰ Berdasarkan data UNESCO, perbedaan cukup kontras terlihat dimana total anak perempuan yang menempuh proses belajar di sekolah berkembang menjadi 2.5 juta pada tahun 2018 dari yang sebelumnya pada tahun 2001 hampir tidak ada yang dapat

⁶⁹ Wahida Omari, *From Theory to Practice: An overview of women's access to education in Afghanistan, Iran and Pakistan*, Research Paper on Education, 2023, Geneva Centre for Human Rights Advancement and Global Dialogue, diakses dalam <https://gchragd.org/wp-content/uploads/2023/08/Research-Paper-On-Education.pdf> (3/3/2024, 17:08 WIB)

⁷⁰ Muqadasa Ahmadzai, *The War on Schoolgirls: Responding to the Education Crisis in Afghanistan*, Afghanistan Policy Lab, June 2023, School of Public and International Affairs: Princeton University, hal. 1.

mengakses pendidikan, begitu juga dengan perempuan pada jenjang pendidikan lebih tinggi di tahun 2001 berjumlah 5.000 menjadi 100.000 pada tahun 2021, angka melek huruf juga melonjak dari 17% mencapai 30%.

Fenomena tersebut terjadi sebelum adanya Taliban dimana sektor pendidikan masih dapat mengalami peningkatan yang cukup baik, Pada survei tahun 2019, dengan persentase 87% warga Afghanistan mendukung kesempatan yang sama bagi perempuan dibanding dengan laki-laki. Provinsi Balkh yang merupakan salah satu wilayah yang ada di negara Afghanistan menjadi contoh wilayah dengan terbukanya akses sekolah menengah bagi perempuan.⁷¹ Sebelum pengambil alihan rezim pada 2021, konstitusi negara membantu masa pemulihan dan menjaga hak-hak perempuan. Berdasarkan upaya tersebut pula akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan meningkat, terlebih pada perempuan yang tinggal di kota atau dekat dari kota. tahun 2021 sejarah kembali terulang dengan kedatangan Taliban dimana perempuan kehilangan harapan atas masa depan pendidikan mereka serta peraturan yang membatasi aktivitas perempuan. Sampai pada titik Kementerian Urusan Perempuan digantikan oleh regulasi dari Kementerian Kekerasan dan Kebajikan Taliban.⁷²

Pada tahun 2022, keadaan di Afghanistan menjadi rumit, ditunjukkan dengan larangan anak perempuan bersekolah serta larangan pada tingkat perguruan tinggi, hal ini kemudian menjadi bentuk kilas balik yang dialami saat

⁷¹ Unesco, *Let girls and women in Afghanistan learn!*, 20 April 2023, diakses dalam <https://www.unesco.org/en/articles/let-girls-and-women-afghanistan-learn> (2/3/2024, 14:57 WIB).

⁷² Fershta Barakzai, *Women's Education Under the Taliban*, Global History Dialogues, 2023, diakses dalam <https://globalhistorydialogues.org/projects/womens-education-under-the-taliban/> (2/3/2024,14:59 WIB).

rezim Taliban terdahulu, dengan hal tersebut Afghanistan dipandang sebagai negara dengan aturan yang paling ketat atas eksistensi perempuan pada sektor pendidikan dalam kacamata dunia.⁷³ Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan Taliban pada desember 2021 ada tiga poin yang diungkapkan terkait hak-hak perempuan yakni sebagai berikut:

- a) Perempuan memiliki hak warisan serta hak perkawinan
- b) Dilarang memaksa perempuan dewasa untuk menikah
- c) Perempuan janda memiliki bagian dari harta suami.

Namun, perihal masalah perempuan lain seperti pernikahan anak (usai dini), hak perempuan untuk bekerja, hak terhadap akses pendidikan, dan keterlibatan dalam ranah politik dan publik bukan menjadi poin utama kebijakan Taliban.⁷⁴

Berikut merupakan kebijakan Taliban yang berpengaruh pada sektor pendidikan Afghanistan; 1.) Mewajibkan pemisahan pintu masuk bagi perempuan dan laki-laki di sekolah; 2.) Mengkhususkan murid perempuan untuk diberi pengajaran hanya pada guru perempuan; 3.) Penggabungan kelas dapat dilakukan apabila jumlah perempuan kurang dari 15 orang; 4.) Memberi tirai sebagai pemisah antara murid laki-laki dan perempuan pada kelas campuran; 5.) Melarang akses anak perempuan pada tingkat pendidikan menengah.⁷⁵

⁷³ Khudai Noor Nasar, *Afghanistan: Taliban increase crackdown on girls' education*, 30 Oktober 2024, diakses dalam <https://www.dw.com/en/afghanistantaliban-increase-crackdown-on-girls-education/a-67257146> (2/3/2024, 15:04 WIB)

⁷⁴ Kalsoom Hanif, dkk, *Women's Rights In Afghanistan Under Taliban Rule 1996-2001 And 2021-2022: A Comparative Study*, Journal of Namibian Studies, Vol, 32, (2022), Lahore: Multidisciplinary, hal. 320.

⁷⁵ SIGAR, *Status of Education in Afghanistan: Taliban Policies Have Resulted in Restricted Access Status of Education in Afghanistan: Taliban Policies Have Resulted in Restricted Access to Education and a Decline Quality*, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, October 2023, hal.4

Setiap tahun semenjak kekuasaan Taliban tahun 2021 sampai pada 2023, Taliban terus mengeluarkan kebijakan baru yang semakin membatasi gerakan perempuan, seperti yang terlihat di bawah ini.

Tabel 2.1. Kebijakan Taliban terkait Perempuan Tahun 2021-2023

Agustus 2021	September 2021	Desember 2021	Maret 2021
Pengambilalihan rezim Taliban di Kabul	Larangan akses pendidikan anak perempuan di tingkat menengah	Larangan pada perempuan untuk bepergian dengan jarak lebih dari 72 km tanpa didampingi laki-laki (mahram)	Perpanjangan kedua larangan pendidikan menengah bagi anak perempuan
Desember 2022	Maret 2023	April 2023	Juni 2023
<ul style="list-style-type: none"> - Larangan pendidikan perempuan di tingkat universitas - Larangan perempuan bekerja di NGO - Larangan kursus pendidikan swasta perempuan di luar tingkat dasar 	Perpanjangan kedua larangan pendidikan menengah bagi anak perempuan	Larangan atas perempuan bekerja di agensi PBB	Perintah lisan yang mengarahkan LSM Internasional untuk memberhentikan operasi sektor pendidikan serta mengalihkan ke kementerian pendidikan Taliban

Sumber: Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR)

Berdasarkan regulasi yang diterapkan oleh Taliban tersebut donor yang bersumber dari pihak Internasional, telah mengalihkan sebagian besar upaya pendanaan dan program pendidikan pada sekolah swasta termasuk di dalamnya sekolah pendidikan yang berbasis komunitas serta berbagai inisiatif pembelajaran jarak jauh. Terkait dengan arahan Taliban yang menyatakan

larangan pada perempuan untuk bekerja di NGO, hal tersebut di maksudkan pada program pendidikan bilateralnya atau program pendidikan negeri yang secara langsung didanai oleh pemerintah Afghanistan atau entitas serupa. Secara optimis berbagai NGO terlebih yang didanai oleh pihak internasional berupaya untuk tetap melanjutkan program pada organisasi mereka.⁷⁶ Komitmen tersebut juga tidak terkecuali dipegang oleh Sakena Fund sebagai NGO yang mendapat donor dari berbagai yayasan internasional dalam menjalankan berbagai program pendidikan perempuan melalui Afghan Institute of Learning.

Di sisi lain kembalinya Taliban di Afghanistan untuk kedua kalinya, AIL yang merupakan program pendidikan dari Sakena Fund tetap melanggengkan eksistensinya dalam mendidik para perempuan. Meskipun negara Afghanistan berada pada posisi yang sulit, dimana militer dan pemerintahan Ghani telah melarikan diri kemudian negara mengalami kekacauan yang dimanfaatkan oleh rezim Taliban untuk menduduki negara tersebut. Begitu pula dengan ketidakpastian masa depan yang akan terjadi, program pembelajaran AIL masih terus berdiri hingga saat ini, meskipun mendapatkan instruksi dari Taliban atas pemisahan tempat belajar bagi laki-laki dan perempuan baik pelajar maupun pengajar. Dokter Sakena Yacoobi mengakui bahwa negaranya berada di persimpangan jalan, akan tetapi bermacam program pendidikan tetap dilakukan Afghan Institute of Learning (AIL) dalam mendorong serta mendukung secara

⁷⁶ SIGAR, *Op. Cit.*, hal 4-5

terus menerus upaya mendidik dan memberikan ruang aman bagi anak-anak dan para perempuan.⁷⁷

2.2. Tantangan Serta Hambatan Perempuan di Afghanistan

2.1.2. Diskriminasi Gender Dalam Masyarakat Afghanistan

Kesetaraan gender sejatinya merupakan hak sosial; Keadilan dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik yang menjadi indikator penting terciptanya kesetaraan. Meskipun terdapat upaya yang mengarah pada kemajuan bagi perempuan seperti; kampanye nasional pemberian akses sekolah anak perempuan; akses layanan kesehatan; ataupun partisipasi sebagai *stakeholder* atau pemegang kebijakan pemerintahan, nyatanya diskriminasi atas gender masih diperpanjang. Mayoritas perempuan masih terbatas atas hak mereka baik secara formal maupun informal, serta kehilangan kendali atas diri mereka. Hambatan struktural mengenai stigma perempuan dalam lingkup masyarakat menjadi unsur yang mempengaruhi terciptanya kesetaraan. Lanskap politik Afghanistan telah membuat konfigurasi, dimana perempuan dianggap berbeda yakni sebagai pihak inferior dari segi status maupun hukum yang menjadi tantangan atas pemenuhan capaian kesuksesan perempuan.⁷⁸

Praktik kultur serta agama menjadi hal krusial dalam memahami citra yang kurang baik dari Afghanistan pada perlindungan perempuan. Upaya para misoginis menitikberatkan reformasi yang bertentangan dengan basis agama

⁷⁷ Global Campaign for PEACEducation, *Afthe the Fall: Afghan Institute of Learning Continues to Educate Girls and Women*, 18 Agustus 2021, diakses dalam <https://www.peace-ed-campaign.org/after-the-fall-afghan-institute-of-learning-continues-to-educate-girls-and-women/> (22/3/2024, 20:21 WIB)

⁷⁸ Hamish Nixon, 2009, *Promoting Democracy under Conditions of State Fragility-Foreign & Security Policy*, First Edition, Berlin: Heinrich Böll Foundation, hal.25

serta budaya yang dimiliki, juga adanya pengklaiman tentang berbagai permasalahan perempuan menjadi ranah privat, sehingga perihal ketidakberdayaan bukan menjadi hal penting pada regulasi kewenangan negara. Walhasil dominasi laki-laki pada institusi, norma serta nilai-nilai yang merugikan perempuan tidak menjadi perhatian negara, sehingga perlu adanya pengarusutamaan perempuan sebagai bentuk “kekuatan negara” yang memungkinkan untuk meminimalisir ketidakberdayaan perempuan.⁷⁹

Supremasi hukum akibat perang saudara yang terjadi di Afghanistan menyebabkan minimnya keadilan formal untuk ditegakkan sehingga diskriminasi, kejahatan, serta aksi-aksi yang seharusnya melanggar hukum, tidak mendapatkan sanksi, situasi ini juga mendukung atas rasa tidak aman perempuan karena kejahatan dapat terjadi kapan saja, terlebih saat berada di luar rumah, yang berpotensi besar bagi perempuan menjadi korban kekerasan hingga perbuatan asusila, sehingga perempuan tidak dapat terlindungi.⁸⁰ Pengaruh asing juga menjadi reaksi negatif yang dihadapi perempuan Afghanistan jika berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan pasca invasi AS yang terjadi.

Target tindak pembunuhan pada sejumlah aktivis perempuan (Sitara Achakzai), polisi senior perwira Malalai Kakar, serta dua Kepala Departemen Urusan Perempuan (Hanifa Safi dan Najiya Siddiqi) secara langsung menunjukkan adanya kekerasan politik di Afghanistan, realita tentang visibilitas

⁷⁹ Isaac Kfir, *Feminist Legal Theory as a Way to the Lack of Progress of Women's Rights in Afghanistan: The Need for a State Strength Approach*, *Journal of Race, Gender, and Social Justice*, Vol, 21, Issue, 1 (2014), William & Mary.

⁸⁰ Maliha Christi, *The Pull to the Liberal Public: Gender, Orientalism, and Peace Building in Afghanistan*, *Journal of Women in Culture and Society*, Vol, 45, No, 3 (2020), Chicago: The University of Chicago Press Journals.

perempuan di lingkungan terbuka atau ranah publik menjadi pemicu kekerasan politik berbasis gender. Keadaan ini tentu menampilkan ketegangan iklim negara yang perlu banyak upaya. Pada dekade terakhir, sekitar 1 miliar dolar saluran bantuan dialirkan oleh komunitas internasional demi pemulihan status perempuan, namun tingkat diskriminasi berbasis gender masih tergolong minim mengalami peningkatan.⁸¹

Di Afghanistan masyarakat yang tergolong konservatif, norma gender tentang perempuan yang bekerja di luar dianggap hal remeh. Sementara, terkait norma gender atas penerapan pendidikan, sekitar lebih dari 80% masyarakat menyetujui keberlangsungan pendidikan terhadap perempuan, dimana kesadaran tersebut juga akan berdampak pada peningkatan ekonomi lebih lanjut.⁸² Setiap manusia yang lahir tidak dapat memilih, baik itu menjadi perempuan ataupun laki-laki, akan tetapi ketimpangan antar keduanya terus dilanggengkan dengan anggapan bahwa pihak laki-laki lebih superior dari pihak perempuan, sehingga ekspektasi sosial menempatkan hak yang dapat mereka miliki masing-masing berbeda, oleh karena itu penting untuk menjunjung adanya perdamaian dan menumpas diskriminasi yang disebabkan oleh perang dan politik patriarki dengan adanya hegemoni global yang hanya akan mengantarkan pada budaya impunitas dan kekacauan berlanjut.⁸³

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Savas Cevik, dkk, *The Impact of Socio-Demographic Factors on the Gender Norms about Women outside Working in Afghanistan*, Research Paper, Vol, 12, No, 2 (2021), Turki: Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi.

⁸³ Sima Samar, *Feminism, Peace, And Afghanistan*, Journal of International Affairs Editorial Board, Vol, 72, No, 2 (Summer 2019), JSTOR.

2.2.2. Tantangan dan Pembatasan yang Dihadapi Perempuan Mengakses Pendidikan

Pendidikan di Afghanistan menurut sejarah berkaitan dengan pendidikan islam (sekolah di Masjid) sebagai metode yang berkembang di negara tersebut, hingga abad ke-19 pendidikan versi barat mulai diperkenalkan seperti pelajaran matematika, bahasa, sains dan sejarah.⁸⁴ Secara umum, pendidikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama mengenyam pendidikan namun, antara hak *de jure* dan kapasitas *de facto* pada pendidikan mengalami kesenjangan, jika melihat masa lalu yang terjadi, pendidikan Afghanistan tidak mendapat perhatian serius, ada sekitar 3,7 juta anak Afghanistan yang tidak menduduki bangku sekolah dengan 60% diantaranya ialah perempuan, konflik terus menerus memberikan dampak negatif pendidikan perempuan Afghanistan, dimana sekolah menjadi tempat pemberontak para kelompok bersenjata yang abai akan pembangunan negara.⁸⁵

Pandangan orang tua atas pendidikan anak perempuan, pernikahan dini, melahirkan anak, serta berbagai ekspektasi yang diskriminatif juga menjadi kendala yang dilanggengkan, begitu pula agama bersifat radikal memberi efek buruk pada bentuk investasi modal masa depan bagi perempuan.⁸⁶ Banyak perempuan muda yang mendapat peluang dengan diterima pada tingkat institusi

⁸⁴ Abdul Qawi Noori, *Job Satisfaction Variance Among Public and Private School Teachers: A Case Study*, Educational Psychology & Counselling, Vol, 10, No, 1 (2023), Australia: Cogent Education, hal.2.

⁸⁵ Muhammad Saleem Mazhar dan Naheed S. Goraya, *Afghan Women Education: Bottlenecks & Future*, A Research Journal of South Asian Studies, Vol, 35, No, 1 (2020), Pakistan: University of the Punjab, hal. 49.

⁸⁶ Abdul G. Noury dan Biagio Speciale, *Social constraints and women's education: Evidence from Afghanistan under radical religious rule*, Journal of Comparative Economic, Vol, 44, No, 4 (2016), Elsevier.

pendidikan tinggi, namun di sisi lain tekanan yang cukup besar dialami mereka, serta lebih berpotensi mendapat kekerasan dari pihak keluarga yang berpedoman pada tradisi kuno, terdapat pandangan para orang tua yang lebih mengutamakan masa depan anak perempuan mereka pada pernikahan dibanding melanjutkan jenjang pendidikan. Masalah selanjutnya, juga bisa datang dari calon suami yang memiliki legitimasi prihal perizinan atas karir atau pendidikan mereka lebih lanjut atau tidak. Pada banyak kasus perempuan terpaksa harus menelan mimpi mereka sebab kewajiban mereka di rumah menjadi hal utama setelah menikah.⁸⁷

Sebelum intervensi Taliban Agustus 2021, dalam sebuah wawancara dengan narasumber mantan wakil Menteri Pendidikan republik Afghanistan yakni Ibrahim Shinwari menyebutkan berbagai hambatan anak perempuan ialah kasus teroris yang menimbulkan kekhawatiran orang tua dalam menyekolahkan anak mereka, jumlah tenaga pengajar perempuan yang minim, infrastruktur pendidikan yang kurang kondusif, kekurangan fasilitas diantaranya alat sanitasi serta air bersih di sekolah, jarak sekolah yang terbentang cukup jauh dari tempat tinggal warga, situasi ekonomi yang menjadi faktor kurangnya dukungan keluarga pada pendidikan anak, pengajar yang dirasa masih kurang kompeten, kendala para guru memaparkan materi dan petunjuk kurikulum, dan sikap konservatif keluarga yang melarang perempuan terlebih pada anak yang berada pada kelas tujuh ke atas dengan terpaku pada budaya tradisional.⁸⁸

⁸⁷ Fred M. Hayward dan Razia Karim, *The Struggle for Higher Education Gender Equity Policy in Afghanistan: Obstacles, Challenges and Achievement*, education policy analysis archives, Vol, 27, No, 139 (2019), United States: University of Massachusetts, Amherst, hal.11.

⁸⁸ Muqadasa Ahmadzai, *The War on Schoolgirls: Responding to the Education Crisis in Afghanistan*, Afghanistan Policy Lab, June 2023, School of Public and International Affairs: Princeton University, hal. 1-2.

Pengambilalihan rezim Taliban pada periode kedua yakni Agustus 2021, kembali memberi batasan aspek pendidikan, pekerjaan, kebebasan berekspresi perempuan yang semakin buruk, perilaku diskriminasi dan kekerasan juga mengancam posisi perempuan.⁸⁹ Rekam jejak Taliban sebelumnya meninggalkan trauma terkhusus pada perempuan, aturan pada layanan kesehatan juga dibatasi dimana perlu dampingan laki-laki (mahram) saat berpergian, dan bagi pelanggar akan dipukuli dan terpaksa harus keluar dari klinik kesehatan yang dikunjungi. Walaupun kesehatan dan pendidikan adalah kebutuhan pokok perempuan, kedua hal tersebut dibatasi di bawah rezim Taliban.

Pada era Taliban berkuasa 2.0 Taliban mengumumkan sebuah wacana pemerintahan baru yang moderat namun, sekali lagi hal tersebut hanya sebuah rancangan yang tidak sesuai dengan implementasinya.⁹⁰ Pada penerapan pendidikan sendiri, Taliban ikut melakukan intervensi atas aturan pemisahan kelas antar lawan jenis yang berbeda, Taliban menekankan perempuan harus lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah, hal tersebut juga terlihat dari kabinet baru Taliban yang meniadakan posisi bagi perempuan, serta pandangan mereka atas perempuan yang sepatutnya mengurus rumah tangga dengan baik atau anggapan mengenai wilayah di ruang terbuka bukan tempat mereka.⁹¹

⁸⁹ Ansley Marie Taylor, 2022, *The Relationship Between Women's Education, Women's Employment, Gender Development, and Gender Inequality*, Master Thesis, University Oslo: Faculty of Law.

⁹⁰ Hafijur Rahman dan Mir Hamza Ramin, *Afghanistan Under the Taliban 2.0: Aspects and Challenges*, (2022), Research Gate, hal. 163-181.

⁹¹ Priyanka Singh, *Challenge Faced by Women Under the Taliban Regime in Afghanistan*, *Journal of Polity & Society*, Vol, 15, No, 1 (2023), India: DAV PG College, hal.35.

2.3. Latar Organisasi Sakena Fund

2.3.1. Sejarah Organisasi Sakena Fund

Gambar 2.1. Sakena Yacoobi (Founder Sakena Fund)



Sumber: sakena.org

Sakena Yacoobi merupakan nama dari pendiri Sakena Fund yang merupakan Non-Governmental Organization (NGO) sejak tahun 1995, Perempuan yang mengembangkan Organisasi ini lahir di Herat, Afghanistan. Sosok yang memberi pengaruh atas hidupnya ialah ayahnya, walaupun antusias yang dimiliki untuk mengemban pendidikan harus terhambat.⁹² Namun, Ia kemudian membuktikan kemampuannya pada perjuangan hak anak-anak, perempuan, serta pendidikan. Beliau juga menjadi pionir dibalik berdirinya sebuah rumah sakit swasta yaitu The Professor Sakena Yacoobi Private Hospital di Herat, sekolah swasta di Kabul dan Herat (The Professor Sakena Yacoobi Private High Schools), serta stasiun radio Meraj di Herat, Afghanistan.⁹³

⁹² Berkley Center for Religion, Peace & World Affairs, *A Discussion with Sakena Yacoobi, Founder of the Afghan Institute of Learning (AIL)*, 2013, GeorgeTown University, diakses dalam <https://berkleycenter.georgetown.edu/interviews/a-discussion-with-sakena-yacoobi-founder-of-the-afghan-institute-of-learning-ail> (4/12/2023, 15:23 WIB).

⁹³ *Profile Sakena Yacoobi*, LinkedIn diakses dalam <https://www.linkedin.com/in/sakena-yacoobi-05629573/> (1/3/2023, 13:22 WIB).

Gambar 2.2. Logo Afghan Institute of Learning (AIL)



Sumber: Sakena.org

Beriringan dengan Sakena Fund, salah satu proyek yang dijalankan adalah pembentukan Afghan institute of learning (AIL) dengan tujuan utamanya dalam memberikan pendidikan, perawatan, kesehatan, pendidikan kesehatan, pelatihan guru, serta pengadaan lokakarya (*workshop*) terkait perdamaian dan *leadership*, juga memberi bantuan hukum bagi perempuan serta anak perempuan.⁹⁴ Afghan Institute of Learning (AIL) merupakan organisasi pertama dengan berorientasi pada penegakan HAM, dimulai dari era Taliban 1990an dimana sekolah bagi anak perempuan ditutup, AIL berkontribusi membuka sekitar 80 sekolah bawah tanah (tertutup) sehingga memungkinkan anak perempuan tetap dapat mengakses pendidikan. Sampai pada akhirnya, saat era Taliban tahun 1996 digulingkan, AIL menjadi organisasi pertama yang menjadi inspirasi bagi organisasi visioner lain atas terciptanya wadah untuk kegiatan belajar mengajar secara terbuka.⁹⁵

⁹⁴ Sakena Fund, *Afghan institute of Learning*, diakses <https://www.sakena.org/afghan-institute-of-learning.php> (30/4/2024, 08:09 WIB).

⁹⁵ International Academy for Multicultural Cooperation, *Biography Dr. SakenaYacoobi*, diakses dalam <https://www.multiculturalcooperation.net/authors/sakena-yacoobi> (2/12/2023, 12:40 WIB).

AIL mengandalkan pendekatan holistik yang melibatkan banyak pihak dalam mencapai pendidikan dan layanan kesehatan memadai, terkhusus bagi perempuan maupun anak perempuan. AIL terus meningkatkan banyak program seperti pelatihan guru dengan pengajaran bersifat interaktif mengenai perdamaian, *leadership*, literasi, kesehatan, HAM dan demokrasi yang kemudian ilmu tersebut dapat ditransfer kepada para siswa siswi.⁹⁶ AIL merupakan organisasi yang berperan dalam membangun sistem pendidikan serta kesehatan yang menjangkau perempuan juga anak perempuan. sejak tahun 1996 telah memberi manfaat dalam sektor pendidikan, pelatihan, dan layanan kesehatan kepada warga Afghanistan. berbagai program yang dijalankan telah memberi inspirasi pada banyak pihak baik itu pemerintah negara maupun NGO lainnya. AIL memiliki kantor di wilayah Kabul dan Herat, Afghanistan.⁹⁷

Program yang dijalankan AIL sangat bervariasi diantaranya pusat pembelajaran (*learning center*), klinik kesehatan, posko tenaga kesehatan masyarakat, lokakarya (*workshop*), Konferensi, Kelas seni (menjahit, melukis, membuat kerajinan), bantuan hukum gratis, Kelompok pemberdayaan Perempuan (Women's Empowerment Group), Klub Pemuda (Youth Club). Fokus program adalah bidang pendidikan dan kesehatan. Sementara terdapat berbagai program swasta lain yang juga diusung oleh Sakena Yacoobi sebagai

⁹⁶ International Academy for Multicultural Cooperation, Biography Dr. Sakena Yacoobi, diakses dalam <https://www.multiculturalcooperation.net/authors/sakena-yacoobi> (2/12/2023, 12:40 WIB).

⁹⁷ Women In The World Foundation, *Afghan Institute of Learning (AIL)*, diakses dalam <https://womenintheworld.org/solutions/entry/afghan-institute-of-learning/> (29/4/2024, 20:14 WIB).

founder juga mengandalkan beragam program AIL sebagai pendukung diantaranya sekolah swasta Profesor Sakena Yacoobi, radio dan TV Meraj.⁹⁸

Gambar 2.3. Sakena Yacoobi sebagai Pembicara di TED Talk Show



Sumber: TEDWomen

Sakena Yacoobi sebagai *founder* dari Sakena fund pernah menjadi pembicara pada sebuah acara *talk show* yakni TED (Technology, Entertainment, Design) yang bercerita tentang kehidupannya dan bagaimana dia mengatasi Taliban yang datang ke kamp pembelajarannya (Afghan Institute of Learning). Meskipun berada dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan, Beliau menunjukkan keberanian, serta tetap tenang dalam menghadapi keadaan tersebut. Saat Taliban datang, Sakena Yacoobi menyambut mereka dengan baik.

Kelompok Taliban tersebut kemudian berujar bahwa sekolah dilarang untuk perempuan, Sakena menjawab “dimana sekolahnya?”, dan dijawab oleh mereka “anda adalah seorang guru disini” sakena kembali menimpali bahwa tempatnya saat ini merupakan tempat tinggal orang lain. Sakena juga menegaskan bahwa para murid datang untuk belajar Al-Qur’an, dimana Al-Qur’an merupakan kitab yang seharusnya ditekuni seorang muslim sehingga

⁹⁸ Sakena Fund, *Afghan institute of Learning*, diakses dalam <https://www.sakena.org/afghan-institute-of-learning.php> (1/5/2024, 07:13 WIB).

para perempuan bisa menjadi istri dan dan ibu yang baik bagi anak mereka, hingga pada akhirnya kelompok Taliban tersebut angkat kaki dari tempat pembelajaran. Intervensi Taliban yang menguasai negara membuat organisasi perlu memikirkan cara agar tetap menjalankan pendidikan bagi perempuan meskipun dengan cara tertutup.⁹⁹

2.3.2. Program Visi dan Misi Sakena Fund

Gambar 2.4. Logo Sakena Fund



Sumber: Sakena.org

Sakena Yacoobi selaku *Founder* Sakena Fund mendirikan program Afghan Institute of Learning (AIL) sebagai metode pendekatan dinamis yang mendukung perubahan sosial. Basis prinsipnya ialah aktif memenuhi kebutuhan masyarakat, dibanding memaksakan solusi atas mereka; menjadi wadah bagi orang-orang terlepas dari latar belakang yang dimiliki; membangun kepercayaan; serta melibatkan masyarakat dalam menjalankan proyek-proyeknya. Di tengah struktur sosial tradisional baik peran gender maupun agama yang menjadi penghambat, Sakena menjadikan NGO akan terciptanya program interaktif pada bidang pendidikan, kesehatan, HAM, Mendukung

⁹⁹ TED Talks, *How I Stopped the Taliban from Shutting Down My School* / Sakena Yacoobi, diakses dalam https://www.ted.com/talks/sakena_yacoobi_how_i_stopped_the_taliban_from_shutting_down_my_school/transcript (20/03/2024, 17:14 WIB)

wujud perdamaian, demokrasi dan isu krusial lainnya, dengan pendekatan responsif demi kemajuan perempuan.¹⁰⁰

Berbagai kontribusi yang disalurkan menjadi petunjuk bagaimana sebuah NGO bergerak dimana secara definisi, NGO merupakan Lembaga independen, bersifat netral atau tidak memihak, menyediakan atau memberikan bantuan darurat yang mendukung pembangunan. NGO umumnya menjalankan kegiatan di tingkat akar rumput dalam memberi pelayanan, bantuan, serta informasi pada khalayak luas.¹⁰¹

Visi Sakena Fund (sebelumnya disebut Creating Hope International) adalah memberi harapan baru bagi korban perang, ketidakstabilan politik yang mengakibatkan kekacauan, serta korban bencana alam dengan membangun kembali kehidupan mereka menjadi lebih cerah, Sementara Misi Sakena Fund ialah untuk menegakkan pemberdayaan perihal pendidikan, pelatihan, serta penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat, juga mendukung organisasi maupun komunitas lain yang memiliki orientasi serupa.¹⁰²

Melihat banyak orang yang kurang terpenuhi dalam kebutuhan pokok baik itu makanan, tempat tinggal, akses kesehatan, pekerjaan serta pendidikan membuat masyarakat utamanya bagi perempuan merasa kurang dapat terpenuhi hak, harga diri, serta pengambilan keputusan atas dirinya sendiri. Dengan akar masalah tersebut Sakena Fund menjunjung serta berkontribusi dengan

¹⁰⁰ Ashoka, *Sakena Yacoobi-Everyone a Changemaker*, diakses dalam <https://www.ashoka.org/en-id/fellow/sakena-yacoobi> (2/12/2023, 14:19 WIB).

¹⁰¹ Emilie Jelinek, *A Study NGO Relations with Government and Communities in Afghanistan*, European Commission, November 2006.

¹⁰² Global Giving, *Creating Hope International (CHI)*, diakses dalam <https://www.globalgiving.org/donate/254/creating-hope-international-chi/> (3/12/2023, 20:37 WIB)

menemukan solusi yang juga mengandalkan pendekatan komunitas lokal. Sakena Fund meyakini pembentukan NGO sebagai strategi yang tepat meningkatkan sumber daya pendidikan serta kesehatan maupun pelatihan pada masyarakat. Melalui prosesnya, upaya untuk menyadarkan mereka atas hak-hak yang seharusnya dimiliki yaitu melalui pendekatan organisasi ini yang merupakan pemasok dana fiskal dari berbagai program yang dijalankan melalui proyek AIL dan proyek swasta lainnya.¹⁰³

2.3.3. Penghargaan Organisasi

Sakena Yacoobi melalui organisasi juga sukses menjadikannya sebagai pakar serta pembicara yang berpengaruh terlebih pada bidang pendidikan anak perempuan, kesehatan, pengungsi serta pemberdayaan perempuan. Tahun 2017, Sakena Yacoobi memperoleh penghargaan perdamaian sunhak, setelah sebelumnya pada 2016, mendapat penghargaan Harold W. McGraw di sektor pendidikan, juga mendapatkan penghargaan WISE pendidikan tahun 2015, juga menerima hadiah Opus pada 2013¹⁰⁴ penghargaan berikutnya juga pada kepemimpinannya Lotus 2012, penghargaan aktivis internasional Gleitsman 2007, penerima Kravis Prize dan Gruber Prize.¹⁰⁵ Sakena Fund membuka relasi yang baik bagi para donatur, pemberi hibah, serta *volunteer* sebagai dukungan atas kelancaran berjalannya program-program organisasi. Dengan begitu, misi

¹⁰³ Sakena Fund, *Creating Hope for Women and Children in Afghanistan*, diakses dalam <https://www.sakena.org/> (3/12/2023, 21: 09 WIB)

¹⁰⁴ Solve.Mit, *Dr. Sakena Yacoobi*, diakses dalam <https://solve.mit.edu/users/sakena-yacoobi-1> (4/12/2023, 13:04 WIB)

¹⁰⁵ *Learning in Distress: Plight of Education in Afghanistan*, Asia Center, Harvard University, November 2021.

dalam meningkatkan kehidupan masyarakat yang masih kurang beruntung dapat lebih terwujud. Nasihat, saran, bimbingan, serta perhatian juga tercurahkan sebagai respon positif keberlangsungan organisasi.

Gambar 2.5. Penerimaan Penghargaan Kravis Prize

Sumber: International Academy for Multicultural Cooperation.

Suatu organisasi media nirlaba di Amerika Serikat bernama ProPublica yang bertujuan menghasilkan laporan investigatif memberikan transparansi laporan anggaran Sakena Fund mulai tahun 2018-2022.



Tabel 2.2. Anggaran Dana Sakena Fund

Anggaran Sakena Fund				
Tahun	Pendapatan	Pengeluaran	Pendapatan Bersih	Aktiva Bersih
2018	\$1.166.131	\$1.316.905	-\$150.774	\$2.618.138
2019	\$1.250.933	\$1.608.427	-\$357.494	\$2.260.644
2020	\$1.506.749	\$1.396.978	\$109.771	\$2.370.415
2021	\$2.656.588	\$1.218.256	\$1.438.332	\$3.808.747
2022	\$1.272.924	\$1.228.945	\$43.979	\$4.108.826

Sumber: Project.ProPublica.org

Berikut ini merupakan daftar pendonor serta pemberi hibah yang tercatat diantaranya:

Tabel 2.3. Donatur dan Pemberi Hibah Organisasi

No	Donatur/ Pemberi Hibah
1.	Abbott
2.	Academy for Educational Development
3.	Afghanistan Reconstruction Support Committee
4.	Afghan Women Leaders Fund (of the Philanthropic Collaborative)
5.	Ann & George Fisher Foundation
6.	Ansara Family Fund
7.	Broetje Orchards
8.	Buffin Foundation
9.	Channel Foundation
10.	Children at Risk
11.	Cosmopolitan Web Designs
12.	Direct Relief International
13.	Empower Fund of the Tides Foundation
14.	Episcopal Relief & Development
15.	Flora Family Foundation
16.	Ginna Fleming – Photographer
17.	Give2Asia
18.	The Global Fund for Children

19.	Global Giving
20.	Google.org
21.	Green Fund
22.	Hand Middle School
23.	Harvest Project
24.	Help the Afghan Children
25.	Johnson and Johnson
26.	Janet Ketcham Foundation
27.	Khaled Hosseini Foundation
28.	Mama Cash
29.	National Endowment for Democracy
30.	National Geographic Society
31.	Nagoya-Sakae Soroptimists
32.	New Global Citizens
33.	Nike Foundation
34.	Open Society Institute
35.	Development Foundation
36.	Peace Education Center (Teachers College, Columbia University)
37.	Refugees International
38.	Rex Foundation
39.	Schwab Fund
40.	Shaler Foundation
41.	Silicon Valley Community Foundation
42.	Sisterhood is Global Institute
43.	Skoll Foundation
44.	Ten Dollar Club
45.	The Seekers Church
46.	3 Guineas Fund
47.	Tides Foundation
48.	University of Delaware
49.	US Afghan Women's Council
50.	Virginia Wellington Cabot Foundation
51.	Zonta International

Sumber: Sakena.org